Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume. 3, Nomor. 4, November 2026
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 291-309
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i4.2728
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Pengaruh Belanja Modal, Upah Minimum, *Human Capital* terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2020-2024

The Impact of Capital Expenditures, Minimum Wages, and Human Capital on Poverty Rates in Regencies and Cities of East Java, 2020–2024

Syarifatul Fitriyah[1*], Debby Nindya Istiandari[2]
[1-2]Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

**Penulis Korespondensi: syarifatulfitriyah74@gmail.com*

Abstract. *Poverty remains a major development challenge in East Java, where socioeconomic conditions vary across regions. This study aims to analyze the effects of capital expenditure, minimum wages, life expectancy, and mean years of schooling on poverty in the regencies and municipalities of East Java during the 2020–2024 period. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The dataset comprises 190 observations from 38 regencies and municipalities over five years. Panel data regression analysis was conducted using Stata 14, with the Fixed Effects Model (FEM) and cluster-robust standard errors selected as the preferred estimation method. The research results indicate that the minimum wage has a positive and significant effect on poverty, while life expectancy has a negative and significant effect; conversely, capital expenditure and the average number of years of schooling have a positive but statistically insignificant effect on poverty. Overall, all independent variables have a significant impact on poverty. These findings suggest that economic factors and factors related to human aspects have varying relationships with poverty across the regencies and cities in East Java.*

Keywords*: Average Years of Schooling; Capital Expenditure; Life Expectancy; Minimum Wage; Poverty.*

Abstrak. Kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan di Jawa Timur, dengan kondisi sosial-ekonomi yang bervariasi antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, upah minimum, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di kabupaten dan kota di Jawa Timur selama periode 2020– 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Data tersebut mencakup 190 observasi dari 38 kabupaten/kota selama lima tahun. Analisis regresi data panel dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata 14. *Model Fixed Effect (FEM) dengan cluster-robust standard errors* dipilih sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan, angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan belanja modal dan rata-rata lama sekolah berpegaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan, seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi dan manusia memiliki hubungan yang berbeda terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kata kunci: Angka Harapan Hidup; Belanja Modal; Kemiskinan; Rata-rata Lama Sekolah; Upah Minimum.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan tetap menjadi salah satu isu sentral dalam pertumbuhan ekonomi karena ia tidak hanya berhubungan dengan kemampuan masyarakat yang minim untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menunjukkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan penghasilan yang memadai. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan memengaruhi banyak aspek kehidupan, sehingga penanggulangannya memerlukan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan (Dharmawan et al., 2025; Todaro, 2011). Oleh karena itu, tingkat kemiskinan

Naskah Masuk: 25 Agustus 2026; Revisi: 20 September 2026; Diterima: 30 Oktober 2026; Terbit: 11 November 2026

menjadi salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi persoalan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 11,09 persen dan meningkat menjadi 11,40 persen pada tahun 2021. Selanjutnya, persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2022 yakni menjadi 10,38 persen, terjadi penurunan lagi pada tahun 2023 sebesar 10,35 persen, dan sampai pada tahun 2024 sebesar 9,79 persen (BPS, 2024). Meskipun menunjukkan kecenderungan menurun setelah tahun 2021, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah. Terlebih lagi, kondisi kemiskinan di Jawa Timur tidak tersebar secara merata karena terdapat perbedaan karakteristik sosial dan ekonomi antar kabupaten/kota (BPS, 2021).

Dari perspektif kebijakan wilayah, Belanja modal merupakan salah satu alat yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Berdasarkan data penelitian, belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2020–2024 memiliki nilai rata-rata sekitar Rp376 juta, dengan nilai minimum sekitar Rp69,4 juta dan maksimum sekitar Rp2,03 miliar (DJPK, diolah). Perbedaan nilai belanja modal antardaerah menunjukkan adanya perbedaan kapasitas dan prioritas pembangunan daerah. Kondisi tersebut penting diperhatikan karena alokasi belanja modal diharapkan dapat mendukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Secara empiris, AC et al. (2023) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2017–2021. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa belanja modal yang lebih tinggi berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dalam penelitian tersebut. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh (Rahmawati et al., 2024) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2017–2022, yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dengan kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemiskinan belum konsisten antarwilayah, sehingga perlu diuji kembali pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode penelitian 2020–2024.

Selain belanja modal, kondisi pasar tenaga kerja juga menjadi bagian yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data penelitian, upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2020–2024 memiliki rata-rata sebesar Rp2.583.151, dengan nilai

terendah Rp1.913.322 dan tertinggi Rp4.725.479 (BPS, 2025b). Perbedaan tingkat upah minimum tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja antardaerah. Namun, kebijakan upah minimum tidak secara langsung mencakup seluruh penduduk karena penerapannya terutama berkaitan dengan pekerja dalam hubungan kerja tertentu. Secara empiris, AC et al. (2023) menemukan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2017–2021. Hasil berbeda ditemukan oleh (Falaq & Wijaya, 2024), yang menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan upah minimum dengan kemiskinan masih perlu dikaji lebih lanjut pada wilayah dan periode penelitian yang berbeda.

Selain faktor ekonomi, kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam melihat kondisi kemiskinan. Dalam penelitian ini, kualitas sumber daya manusia direpresentasikan melalui Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AHH digunakan sebagai indikator dimensi kesehatan yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat, sedangkan RLS digunakan sebagai indikator dimensi pendidikan yang menggambarkan rata-rata lama pendidikan formal penduduk. Kedua indikator tersebut merepresentasikan aspek kesehatan dan pendidikan yang dapat berkaitan dengan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, memperoleh pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, AHH dan RLS digunakan untuk menganalisis keterkaitan dimensi kesehatan dan pendidikan dengan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang terdiri dari 190 observasi, rata-rata AHH kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2020–2024 sebesar 72,10 tahun, sedangkan rata-rata RLS sebesar 8,22 tahun (BPS, diolah). Pada tingkat provinsi, RLS Jawa Timur juga menunjukkan peningkatan dari 7,78 tahun pada 2020 menjadi 8,28 tahun pada 2024 (BPS, 2025). Perbedaan capaian pendidikan dan kesehatan antardaerah menunjukkan adanya variasi kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur. Kondisi tersebut penting diperhatikan karena pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Secara empiris, Samudro (2023) menemukan bahwa RLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, Putri & Hasmarini (2025) menemukan bahwa AHH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan RLS berpengaruh positif dan signifikan di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan indikator kesehatan dan

pendidikan dengan tingkat kemiskinan belum konsisten. Oleh karena itu, pengaruh AHH dan RLS terhadap tingkat kemiskinan perlu diuji kembali pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai hubungan belanja modal, upah minimum, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah dengan tingkat kemiskinan. Perbedaan temuan tersebut menjadi dasar untuk menguji kembali hubungan antarvariabel pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, upah minimum, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Berbeda dari penelitian yang hanya menggunakan satu indikator sumber daya manusia, penelitian ini menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk merepresentasikan dimensi kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan faktor fiskal daerah, pasar tenaga kerja, serta kualitas sumber daya manusia dengan tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai keadaan di mana pendapatan berada pada level yang rendah, namun juga merupakan keterbatasan kemampuan individu dalam meraih kehidupan yang memadai. Pendekatan *capability* yang dikembangkan oleh Amartya Sen memandang kesejahteraan berdasarkan kemampuan individu untuk mencapai berbagai fungsi kehidupan (*functionings*) yang bernilai, sehingga kemiskinan dapat dipahami sebagai bentuk keterbatasan kemampuan atau kesempatan yang dimiliki seseorang. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pendapatan merupakan bagian yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya (Sen, 1999).

Dalam studi ini, tingkat kemiskinan dipakai sebagai variabel yang bergantung dan diukur melalui proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penggunaan tingkat kemiskinan sebagai indikator memungkinkan penelitian melihat perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat serta keterkaitannya dengan kebijakan ekonomi daerah dan kualitas sumber daya manusia.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran dari pemerintah yang dialokasikan untuk mendapatkan atau membangun aset tetap yang memberikan keuntungan selama lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2014; Jannah et al., 2024). Belanja modal dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan berbagai aset daerah lainnya. Dalam pandangan Keynesian, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen permintaan agregat sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi, output, dan kesempatan kerja dalam jangka pendek (Jahan, 2014). Dalam konteks daerah, belanja modal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, mendukung aktivitas ekonomi, serta meningkatkan produktivitas masyarakat (Mardiasmo, 2018). Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Namun, pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan dapat berbeda bergantung pada jenis belanja, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Upah Minimum

Upah minimum merupakan instrumen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja melalui penetapan batas upah terendah yang wajib dibayarkan kepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan dalam periode tertentu. Menurut *International Labour Organization* (ILO), penetapan upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja dari tingkat upah yang terlalu rendah dan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan serta ketimpangan (ILO, 2015). Secara teoritis, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli pekerja sehingga membantu memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga (Sukirno, 2016). Namun, kenaikan upah minimum juga dapat meningkatkan biaya tenaga kerja bagi perusahaan yang berpotensi memengaruhi permintaan tenaga kerja (Mankiw, 2018). Oleh karena itu, pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan tidak selalu sama dan dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja, kepatuhan perusahaan, serta cakupan pekerja yang menerima upah minimum.

Human Capital

Selain aspek ekonomi, kualitas dari sumber daya manusia juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori modal manusia yang dikembangkan oleh Becker menjelaskan bahwa pendidikan, kesehatan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adalah bentuk investasi yang dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatan individu (Becker, 1964). Individu yang memiliki kualitas modal manusia yang lebih baik

cenderung mampu bekerja lebih produktif dan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, modal manusia diukur melalui angka harapan hidup sebagai indikator kesehatan dan rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan rata-rata estimasi lama hidup individu sejak lahir dan berfungsi sebagai salah satu parameter untuk menilai keadaan kesehatan populasi. Kenaikan AHH menandakan adanya perbaikan dalam kondisi kesehatan yang dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Komunitas dengan keadaan kesehatan yang lebih baik cenderung memiliki kapasitas untuk bekerja dengan lebih efisien, sehingga berpotensi mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan AHH secara teori dapat mengangkat taraf hidup masyarakat serta berperan dalam pengurangan angka kemiskinan (Becker, 1964).

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan total tahun yang dihabiskan masyarakat untuk menjalani pendidikan formal. Pendidikan menjadi salah satu bentuk investasi pada sumber daya manusia karena dapat meningkatkan wawasan, keterampilan, dan kapabilitas individu. Peningkatan RLS bisa memperluas peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta meningkatkan penghasilan. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja, kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kondisi kemiskinan juga semakin meningkat (Becker, 1964). Oleh karena itu, secara teoritis peningkatan kualitas *human capital*, baik melalui perbaikan kesehatan maupun peningkatan pendidikan, diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang telah tersedia dan dikumpulkan atau dipublikasikan oleh instansi tertentu (Sugiyono, 2019). Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja modal, upah minimum, Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap tingkat kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024. Data yang digunakan berbentuk data panel, yaitu gabungan data *cross-section* dan *time series*, dengan total 190

observasi yang diperoleh dari 38 kabupaten/kota selama lima tahun pengamatan (Wooldridge, 2020).

Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Stata. Variabel belanja modal dan upah minimum ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln), sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggunakan nilai aslinya. Transformasi logaritma digunakan untuk mengubah skala data dan memungkinkan interpretasi koefisien berdasarkan perubahan relatif pada variabel yang ditransformasikan. Tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat diukur dalam persen, belanja modal dalam miliar rupiah, upah minimum dalam rupiah per bulan, sedangkan AHH dan RLS diukur dalam tahun. Data tingkat kemiskinan, upah minimum, AHH, dan RLS bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data belanja modal bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, estimasi akhir menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *cluster-robust standard errors* pada tingkat kabupaten/kota untuk mengakomodasi kemungkinan heteroskedastisitas dan korelasi galat dalam unit pengamatan yang sama.

Persamaan regresi data panel dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KMSKN_{it} = \alpha_i + \beta_1 lnBM_{it} + \beta_2 lnUM_{it} + \beta_3 AHH_{it} + \beta_4 RLS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$KMSKN_{it}$ = Tingkat kemiskinan kabupaten/kota (i) pada tahun (t); α_i = Konstanta yang menunjukkan efek tetap masing-masing kabupaten/kota; β_1, β_2, β_3, dan β_4 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen; $lnBM_{it}$ = Logaritma natural belanja modal; $lnUM_{it}$ = Logaritma natural upah minimum; AHH_{it} = Angka harapan hidup; RLS_{it} = Rata-rata lama sekolah; ε_{it} = Komponen galat (*error term*); i = Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur; t = Periode tahun 2020–2024.

Analisis terhadap penelitian dimulai dengan statistik deskriptif yang berfungsi untuk menggambarkan karakteristik data penelitian melalui nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan deviasi standar. Setelah itu, analisis dilakukan pada regresi data panel dengan menggunakan tiga jenis model, yaitu Model Efek Umum (CEM), Model Efek Tetap (FEM), dan Model Efek Acak (REM). Untuk menentukan model yang paling cocok, dilakukan pengujian Chow untuk memilih antara CEM dan FEM serta pengujian Hausman untuk membedakan antara FEM dan REM (Gujarati, 2009).

Setelah estimasi model regresi data panel dilakukan, pengujian asumsi klasik dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam model. Pengujian meliputi uji

multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF), uji heteroskedastisitas menggunakan *Modified Wald test*, dan uji autokorelasi menggunakan *Wooldridge test*. Hasil pengujian menunjukkan adanya heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingga estimasi akhir menggunakan *cluster-robust standard errors* pada tingkat kabupaten/kota untuk memperoleh kesalahan baku yang robust terhadap kedua permasalahan tersebut.

Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Uji t dilakukan untuk menganalisis dampak setiap variabel independen terhadap Tingkat Kemiskinan secara individual. Uji F berfungsi untuk mengukur dampak Belanja Modal, Upah Minimum, AHH, dan RLS secara bersamaan terhadap Tingkat Kemiskinan. Di sisi lain, koefisien determinasi (R^2) dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam Tingkat Kemiskinan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024, dengan total 190 observasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Stata untuk menguji pengaruh belanja modal, upah minimum, Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap tingkat kemiskinan.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif berfungsi untuk menyajikan ilustrasi tentang ciri-ciri variabel penelitian berdasarkan nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan deviasi standard.

```
. summarize KMSKN lnBM lnUM AHH RLS
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
KMSKN	190	10.54879	4.410621	3.06	23.76
lnBM	190	19.4931	.6553671	18.05468	21.42904
lnUM	190	14.72615	.2647115	14.46435	15.36848
AHH	190	72.10116	1.999415	66.74	75.18
RLS	190	8.221947	1.614001	4.85	12.11

Gambar 1. Hasil Statistik Deskriptif

SumZber: Data diolah menggunakan Stata 14, 2026

Berdasarkan gambar yang ditunjukkan, total variabel yang diteliti mencapai 190 observasi, yang berasal dari 38 daerah di Provinsi Jawa Timur selama rentang waktu antara 2020 hingga 2024. Tingkat kemiskinan mencatat nilai rata-rata sekitar 10,54879 persen,

dengan angka terendah 3,06 persen dan tertinggi 23,76 persen. Untuk belanja modal, nilai rata-ratanya tercatat sebesar 19,4931, dengan nilai terendah 18,05468 dan tertinggi 21,42904. Selanjutnya, upah minimum rata-rata berada di angka 14,72615, dengan nilai terendah 14,46435 dan tertinggi 15,36848. Variabel angka harapan hidup menunjukkan rata-rata nilai 72,10116 tahun, sedangkan nilai minimum dan maksimumnya masing-masing adalah 66,74 tahun dan 75,18 tahun. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah memiliki rata-rata 8,221947 tahun, dengan nilai terendah 4,85 tahun dan tertinggi 12,11 tahun.

Estimasi Regresi Data Panel

Analisis selanjutnya dilakukan menggunakan regresi data panel dengan tiga model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Estimasi dilakukan untuk mengetahui hubungan belanja modal, upah minimum, AHH, dan RLS terhadap tingkat kemiskinan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai. Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), sedangkan uji Hausman digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Table 1. Data Hasil Penelitian Model Regresi Data Panel

Pengujian	Perbandingan Model	Statistik	Probabilitas	Keputusan
Uji Chow	CEM vs FEM	F(37,148) = 317,92	0,0000	FEM
Uji Hausman	FEM vs REM	$Chi^2(4)$ = 563,31	0,0000	FEM

Sumber: Data diolah menggunakan Stata 14, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000, lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, FEM dipilih dibandingkan CEM. Selanjutnya, hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000, sehingga hipotesis nol ditolak dan FEM dipilih dibandingkan REM. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model estimasi regresi data panel.

Uji Asumsi Klasik

Setelah model regresi ditentukan, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Table 2. Data Hasil Uji Asumsi Klasik Data Panel

Uji	Nilai Statistik	Probabilitas	Keterangan
Multikolinearitas	Mean VIF = 2,00	-	Tidak terdapat multikolinearitas
Heteroskedastisitas	χ^2 = 1032,03	0,0000	Terdapat heteroskedastisitas
Autokorelasi	F = 12,673	0,0010	Terdapat autokorelasi

Sumber: Data diolah menggunakan Stata 14, 2026.

Berdasarkan Tabel tersebut, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Mean VIF sebesar 2,00. Nilai tersebut berada di bawah batas umum 10, sehingga tidak menunjukkan adanya masalah multikolinearitas antarvariabel independen dalam model. Selanjutnya, hasil *Modified Wald test* memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000, sehingga menunjukkan adanya heteroskedastisitas pada model. Sementara itu, hasil *Wooldridge test* menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0010, yang menunjukkan adanya autokorelasi dalam model.

Karena ditemukan heteroskedastisitas dan autokorelasi, maka estimasi akhir dilakukan menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *cluster-robust standard error* pada tingkat kabupaten/kota.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pemilihan model dan uji asumsi klasik, estimasi akhir menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *cluster-robust standard error*. Estimasi tersebut dihasilkan dari 190 pengamatan yang mencakup 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Estimasi yang telah diperoleh digunakan untuk menganalisis dampak dari belanja modal, upah minimum, angka harapan hidup (AHH), dan rata-rata lama sekolah (RLS) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten atau kota dalam Provinsi Jawa Timur selama periode 2020 sampai 2024.

```
. xtreg KMSKN lnBM lnUM AHH RLS, fe vce(cluster ID)

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       190
Group variable: ID                              Number of groups   =        38

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.7796                                         min =         5
     between = 0.1595                                         avg =       5.0
     overall = 0.1670                                         max =         5

                                                F(4,37)            =     75.64
corr(u_i, Xb)  = -0.4379                        Prob > F           =    0.0000

                                    (Std. Err. adjusted for 38 clusters in ID)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       KMSKN |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        lnBM |   .0292167   .0768799     0.38   0.706    -.1265567    .1849901
        lnUM |   4.830029   1.061747     4.55   0.000     2.678725    6.981333
         AHH |  -2.097139   .2142559    -9.79   0.000    -2.531262   -1.663015
         RLS |   .3223524   .2664306     1.21   0.234    -.2174873     .862192
       _cons |   87.40731   11.78252     7.42   0.000     63.53366     111.281
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  4.5145184
     sigma_e |  .31899585
         rho |  .99503197   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

.
```

Gambar 2. Hasil Estimasi FEM dengan *Cluster-Robust Standart Error*

Sumber: Data diolah menggunakan Stata 14, 2026.

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *cluster-robust standard error*, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$KMSKN_{it} = 87{,}40731 + 0{,}0292167 lnBM_{it} + 4{,}830029 lnUM_{it} - 2{,}097139 AHH_{it} + 0{,}3223524 RLS_{it}$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 87,40731 berarti apabila belanja modal, upah minimum, AHH, dan RLS dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan memiliki nilai sebesar 87,40731. Koefisien X1 (Belanja Modal) sebesar 0,0292167 menunjukkan hubungan positif dengan tingkat kemiskinan. Koefisien X2 (Upah Minimum) sebesar 4,830029 menunjukkan hubungan positif dengan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, koefisien X3 (AHH) sebesar -2,097139 menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Sementara itu, koefisien X4 (RLS) sebesar 0,3223524 menunjukkan hubungan positif dengan tingkat kemiskinan. Tanda positif dan negatif pada koefisien menunjukkan arah hubungan masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemiskinan dalam model penelitian.

Uji t (Parsial)

a. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja modal memiliki koefisien sebesar 0,0292167 dengan nilai probabilitas sebesar 0,706. Nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan positif, tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024.

b. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024.

Hasil studi menunjukkan bahwa upah minimum memiliki koefisien 4,830029 dengan probabilitas 0,000. Nilai probabilitas yang lebih rendah dari 0,05 menunjukkan bahwa upah minimum berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

c. Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024.

Hasil dari studi menunjukkan bahwa angka harapan hidup (AHH) mempunyai koefisien sebesar -2,097139 dengan probabilitas 0,000. Mengingat nilai probabilitas yang lebih rendah dari 0,05, maka AHH memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama tahun 2020–2024.

d. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) memiliki koefisien sebesar 0,323524 dengan nilai probabilitas sebesar 0,234. Nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa RLS memiliki hubungan positif, tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024.

Uji F (Simultan)

Secara simultan, hasil analisis menunjukkan nilai F-statistik sebesar 75,64 dengan probabilitas 0,0000. Dengan memperhatikan bahwa nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka pengeluaran untuk investasi, Upah Minimum, AHH, dan RLS secara keseluruhan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *R-squared* yang mencapai 0,7796 menandakan bahwa kurang lebih 77,96% perubahan dalam tingkat kemiskinan yang diakibatkan oleh variasi di kabupaten/kota antara tahun 2020 dan 2024 dapat dipahami melalui belanja modal, upah minimum, AHH, dan RLS yang terdapat dalam model, sedangkan 22,04% sisanya dipengaruhi oleh elemen lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Bagian ini membahas hasil penelitian mengenai pengaruh belanja modal, upah minimum, Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024. Pembahasan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil pengujian masing-masing variabel dan mengaitkannya dengan teori, kondisi yang terjadi di Jawa Timur, serta hasil penelitian terdahulu. Pembahasan setiap variabel disajikan berdasarkan hasil uji parsial yang telah diperoleh.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024

Secara teoritis, belanja modal diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan melalui pengembangan fasilitas publik yang memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan positif, tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien sebesar 0,0292167 dan probabilitas sebesar 0,706. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan, dengan asumsi variabel lain tetap. Akan tetapi, nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan

tersebut tidak signifikan secara statistik. Situasi ini bisa terkait dengan sifat pengeluaran infrastruktur dari pemerintah daerah yang manfaatnya tidak selalu langsung dirasakan oleh masyarakat miskin dalam jangka pendek. Penelitian yang dilakukan oleh (Darmastuti, 2022) mengungkapkan bahwa rata-rata proporsi pengeluaran infrastruktur untuk kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2015 hingga 2019 hanya sekitar 20% dari total belanja daerah, sehingga ruang fiskal untuk pengeluaran infrastruktur masih cukup terbatas.

Kondisi tersebut masih terlihat pada periode yang lebih baru. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur, rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2024 sebesar 12,30%, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 14,64%. Selain itu, terdapat perbedaan alokasi belanja modal antarwilayah, dengan beberapa kabupaten/kota memiliki pagu yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya (Bank, 2024). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa besarnya belanja modal secara agregat belum tentu memberikan manfaat yang sama pada seluruh wilayah dan belum tentu langsung berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat miskin pada tahun yang sama.

Kondisi pelaksanaan belanja modal juga terlihat dalam pemberitaan ANTARA Jawa Timur mengenai evaluasi pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun 2024. Dalam pemberitaan tersebut, DPRD Jawa Timur mendorong peningkatan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan agar serapan belanja modal dapat meningkat. Realisasi belanja modal secara keseluruhan mencapai 93,09%, sedangkan realisasi pada komponen belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi tercatat sebesar 78,67%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran belanja modal telah dialokasikan, pelaksanaannya pada beberapa jenis pembangunan masih belum sepenuhnya optimal.

Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu penjelasan mengapa belanja modal dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Belanja modal pada umumnya digunakan untuk pembangunan aset yang manfaatnya tidak selalu dapat dirasakan masyarakat secara langsung dalam jangka pendek. Pembangunan jalan, irigasi, jaringan, gedung, dan sarana publik lainnya membutuhkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan sebelum memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan belanja modal pada suatu periode belum tentu langsung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan pada periode yang sama.

Temuan penelitian ini memiliki arah hubungan yang sama dengan penelitian (Rahmawati et al., 2024), yang menemukan hubungan positif antara belanja modal dan kemiskinan. Namun, terdapat perbedaan pada signifikansi statistik, karena penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan positif tersebut tidak signifikan. Perbedaan hasil ini

mengindikasikan bahwa hubungan antara belanja modal dan kemiskinan dapat berbeda menurut karakteristik wilayah, periode penelitian, serta model yang digunakan. Oleh karena itu, peningkatan belanja modal belum dapat dianggap secara langsung berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan tanpa mempertimbangkan efektivitas dan pemerataan pemanfaatannya.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024

Secara teori, kenaikan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan penghasilan pekerja, sehingga membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar 4,830029 dan probabilitas 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam model penelitian ini, kenaikan upah minimum berkaitan dengan kenaikan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024, dengan asumsi variabel lain tetap. Kondisi ini bisa terjadi karena upah minimum tidak secara langsung mencerminkan penghasilan semua orang di suatu wilayah. kebijakan upah minimum lebih berhubungan dengan pekerja yang memiliki hubungan kerja resmi, sedangkan orang miskin sering berasal dari kelompok pekerja tidak formal dan kelompok yang tidak mendapatkan upah sesuai aturan yang berlaku.

Fenomena di Jawa Timur menunjukkan bahwa besarnya upah minimum belum selalu diikuti dengan penerimaan upah sesuai ketentuan. Pada Oktober 2024, sekitar 500 buruh di Kabupaten Pasuruan melakukan aksi untuk menuntut pembayaran upah sesuai UMK. Para buruh tersebut dilaporkan menerima sekitar Rp3,95 juta per bulan, sedangkan UMK Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 sebesar Rp4.635.133 (DetikJatim, 2024). Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Situbondo. Pada Mei 2024, buruh menyampaikan bahwa masih terdapat perusahaan yang membayar pekerja di bawah UMK, bahkan terdapat laporan mengenai pekerja yang belum menerima gaji selama tiga bulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besaran upah minimum yang ditetapkan pemerintah belum tentu sama dengan upah yang benar-benar diterima oleh seluruh pekerja (ANTARAjatim., 2024).

Selain itu, terdapat perbedaan besaran upah minimum antarwilayah di Jawa Timur. Pada tahun 2024, UMK Kota Surabaya ditetapkan sebesar Rp4.725.479, sedangkan Kabupaten Situbondo sebesar Rp2.172.287. Penetapan UMK tersebut mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebutuhan rumah tangga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa upah minimum juga mencerminkan karakteristik

ekonomi masing-masing wilayah, sehingga daerah dengan upah minimum lebih tinggi tidak selalu memiliki kondisi kemiskinan yang lebih rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nisa & Wahyuni (2024) yang menggunakan data dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2019 sampai 2022, di mana upah minimum terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Ramadhan (2024) di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2013 hingga 2023, yang menunjukkan bahwa upah minimum berdampak positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk yang miskin. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan upah minimum dengan kemiskinan di Jawa Timur tidak selalu sesuai dengan hubungan teoritis yang diharapkan. Hubungan positif yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai kondisi empiris pada wilayah dan periode penelitian, yang dapat berkaitan dengan karakteristik pasar kerja, perbedaan kondisi ekonomi antarwilayah, serta belum meratanya penerimaan upah sesuai ketentuan.

Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024

Secara teori, naiknya angka harapan hidup menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat semakin membaik. Kesehatan yang lebih baik bisa membantu seseorang bekerja lebih baik dan beraktivitas ekonomi dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan penghasilan dan membantu mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisiennya sebesar -2,097139 dan probabilitas 0,000. Artinya, naiknya AHH diikuti dengan turunnya tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020 hingga 2024.

Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan indikator kesehatan di Jawa Timur. Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan selama periode penelitian, dari sekitar 71,34 tahun pada 2020 menjadi 72,11 tahun pada 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada derajat kesehatan penduduk. BPS Provinsi Jawa Timur juga menjelaskan bahwa AHH merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan dan derajat kesehatan penduduk. Di sisi lain, persentase penduduk miskin Jawa Timur juga mengalami penurunan. Pada September 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,56 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa perbaikan kesehatan berjalan bersamaan dengan membaiknya kondisi kemiskinan di Jawa Timur.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Putri & Hasmarini (2025) yang menggunakan data dari Provinsi Jawa Timur selama periode 2019 hingga 2023. Penelitian tersebut menemukan bahwa AHH memiliki dampak yang negatif dan berarti terhadap tingkat kemiskinan. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sutrisno & Dewi, 2026). Penelitian tersebut menggunakan 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur selama periode 2019 sampai 2023, dan mengajukan hipotesis bahwa peningkatan AHH berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkuat temuan bahwasannya peningkatan kualitas kesehatan yang terlihat melalui Angka Harapan Hidup (AHH) terkait dengan menurunnya tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024

Secara teori, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang, semakin besar peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, hasil estimasi menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki koefisien positif sebesar 0,323524 dengan nilai probabilitas sebesar 0,234. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan RLS cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan, dengan asumsi variabel lain tetap. Akan tetapi, nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, belum terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa RLS berhubungan secara signifikan dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah belum terbukti berkaitan secara signifikan dengan penurunan tingkat kemiskinan dalam model penelitian ini.

Kondisi itu bisa terjadi karena walaupun seseorang sudah menempuh pendidikan yang lama, belum tentu dia memiliki keterampilan yang cocok dengan kebutuhan pekerjaan di dunia kerja. Pemberitaan ANTARA Jawa Timur pada Mei 2024 menyebutkan masih adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, sehingga diperlukan kesesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Kondisi serupa juga disoroti dalam pemberitaan ANTARA Jawa Timur pada November 2024, yang menjelaskan bahwa ketidaksesuaian jurusan dengan kebutuhan daerah dapat membuat lulusan memiliki keterampilan yang kurang sesuai, sementara kesempatan kerja yang tersedia terbatas. Kondisi itu menunjukkan bahwa memperpanjang masa sekolah belum tentu langsung meningkatkan

penghasilan masyarakat, jika tidak disertai dengan keterampilan yang sesuai dan peluang kerja yang cukup.

Selain kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan kerja, faktor ekonomi juga masih menjadi hambatan dalam memperoleh pendidikan. Berdasarkan pemberitaan ANTARA Jawa Timur pada Mei 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung mencatat sekitar 2.000 anak tidak melanjutkan pendidikan formal, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi karena sebagian anak memilih bekerja untuk membantu keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu masih menghadapi hambatan untuk meningkatkan lama sekolah. Sehingga, hubungan antara pendidikan dan kemiskinan tidak hanya tergantung pada lama seseorang bersekolah, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mendapatkan akses ke pendidikan serta mencari pekerjaan setelah selesai sekolah.

Temuan penelitian ini memiliki arah hubungan yang sama dengan penelitian Putri dan Hasmarini (2025) yang menemukan hubungan positif dan signifikan antara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada periode 2019–2023. Namun, terdapat perbedaan pada signifikansi statistik, karena penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan positif tersebut tidak signifikan. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antara rata-rata lama sekolah dan kemiskinan dapat berbeda menurut karakteristik wilayah, periode penelitian, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan RLS belum cukup untuk secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Pendidikan perlu didukung dengan kualitas dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta ketersediaan kesempatan kerja yang memadai agar peningkatan lama sekolah dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan, upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 hingga 2024. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh positif tapi tidak signifikan, sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara bersamaan, belanja modal, upah minimum, AHH, dan

RLS memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai *R-squared* 77,96%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan belanja modal agar lebih tepat sasaran dan merata, memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran upah minimum serta memberikan perhatian pada perlindungan pekerja informal, dan tetap mempertahankan pembangunan di bidang kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan yang link and match dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, serta memperhatikan dampak jangka panjang dari pengeluaran belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

AC, A. M., Fadllan, & Rahmawati, F. N. (2023). *Pengaruh Upah Minimum , Pertumbuhan Ekonomi , Indeks Pembangunan Manusia , Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s / d 2021 Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai oleh semua negara di du*. https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v10i1.xxxx

ANTARAjatim. (2024). *Ratusan Buruh di Situbondo Unjuk Rasa Tolak UMK Terendah se-Jatim.*

Bank. (2024). *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Agustus 2024.*

Becker, G. S. (1964). Uman Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. *National Bureau of Economic Research.*

BPS. (2021). *Beranda Produk - Berita Resmi Statistik Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun*. 14–17.

BPS. (2024). *tabel "Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur."*

BPS. (2025a). *Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur 2025.*

BPS. (2025b). *Upah Minimum menurut Kabupaten/Kotamadya di Jawa Timur (Rupiah), 2020-2025*.

Darmastuti, W. Y. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*, *9*(1).

DetikJatim. (2024). *Buruh Pabrik Pengolahan Kayu di Pasuruan Demo Minta Digaji Sesuai UMK.*

Dharmawan, A. S., Istiqomah, N., Nurmawati, P., & Rohmi, M. L. (2025). Pengaruh tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap tindak kriminalitas di Indonesia tahun 2021–2023. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *3*(4), 27–41. https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1739

Falaq, M. F., & Wijaya, R. S. (2024). Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk, Tingkat

Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, *8*(2), 247–261.

Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometrics (5th ed.).* McGraw-Hill.

Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat.

ILO. (2015). Minimum Wage Policy Guide: Definition and Purpose. *International Labour Organization.*

Jahan, S. M. (2014). *What is Keynesian Economics? Finance & Development*.

Jannah, C. M., Wijaya, I., & Amri, M. (2024). Determinasi belanja operasional dan modal terhadap tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, *2*(4), 27–36. https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i4.489

Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics*. Cengage Learning.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*.

Nisa, A. A., & Wahyuni, A. (2024). Pengaruh IPM , Kesempatan Kerja dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Periode 2019-2022. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, *4*(2), 332–343. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i2.3401

Putri, S. L. K., & Hasmarini, M. I. (2025). Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (2019-2023). *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting*, *8*(3), 2619–2628.

Rahmawati, R. N., Pratiwi, H. E., Lisniwati, M., Afriani, L. D., & Haryadi, A. K. (2024). Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *5*(2), 115–126. https://doi.org/10.33105/jmp.v5i2.492

Ramadhan, V. N. (2024). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Upah Minimum dan PDRB Per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur. *Universitas Katolik Parahyangan.*

Samudro, S. J. (2023). Pengaruh Rasio Ketergantungan, Upah Minimum, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010–2021. *Universitas Jenderal Soedirman.*

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Rajawali Pers.

Sutrisno, M. I., & Dewi, D. D. (2026). The Influence of Years of Schooling, Population Growth Rate, and Life Expectancy on Poverty in East Java Province 2019–2023. *Journal of Tourism Economics and Policy*, *6*(1), 28–43. https://doi.org/10.38142/jtep.v6i1.1739

Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Penerbit Erlangga.

Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.).*